

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alfitra. (2014). *Modus Operandi Khusus Di Luar KUHP*. Jakarta: Jakarta Raih Asa Sukses.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, Dinar, A., & Fadillah, S. (2008). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Dirdjosisworo, S. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penegakan Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati. (2021). *Kampanye Politik Sebuah Pendekatan Femonologi*. Banyumas: CV Amerta.
- Ismawan. (1999). *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Juliansyah, E. (2007). *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Malang Setara Press.
- Kebudayaan, D. P. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelik, P., & Ananto, W. (2010). *Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustitia.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum PILKADA SERENTAK*. Jakarta: Mizan.

- Lamintang, P. A. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mayo, H. B. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Murtopo, A. (1974). *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Reternir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Partanto, P. A., & Barry, M. A. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Prakoso, D., & Imunarsi, A. (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Sleman: CV Budi Utama.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (1987). *Masalah Penegak Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bandung Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru.
- Sadjjojo. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Soedarsono. (2005). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subakti, & Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Subekti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Tutik, T. T. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia.
- Umam, A. K. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.

Jurnal

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan, Volume 1, Nomor 2. *Jurnal Bawaslu Banten*.
- Arafat, Y., Sharin, A., & Hadi, A. M. (2022). Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan, Volume 8, Nomor 2. *Al-Itthiad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*.
- Asnawi, & Mulyana, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Volume 4, Nomor 2. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*.
- Astuti, R. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan di Rutan Polri Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*.
- Damayanti, M. S., Suhlin, I., Sari, H. P., & Hendrianto, Y. T. (2018). Modus Operandi Investasi Ilegal dan Pencucian Uang Periode 2013-2017. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Hermawan, I. A., & Setyawan, F. D. (2021). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar, Volume 3, Nomor 2. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 1, Nomor 1. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH)*.
- Irawan, D. (2015). Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 : Studi Kasus Di Kalurahan Sempaja Selatan, Volume 3, Nomor 4. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Latifa, A., Rahmi, A., Aska, M. K., Saputri, N., Fadli, S., & Munandar, S. (2024). Modus Operandi Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kecamatan Bakso Kabupaten Agam Sumatera Barat, Volume 22, Nomor 3. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*.

- Mahayoga, I. B. (2020). Pengaturan Politik Uang Dalam Prespektif Hukum Pidana Pemilihan Umum, Volume 9, Nomor 6. *Jurnal Kertha Wicara*.
- Mahroza, D. (2024). Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang Pada Pemilu Pasca Reformasi Dalam Prespektif Ekonomi, Politik, Hukum, dan Budaya, Volume 45, Nomor 2. *OJS Unas*.
- Marlinda, E. (2016). Pengaruh Money Politic Terhadap Perilaku Pemula Masyarakat Candi di Kabupaten Sidharjo Dalam Pemilihan Presiden 2014. *Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Apek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta : Edisi 59*.
- Nabila, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan umum, Volume 8, Nomor 2. *Jurnal Publisitas*.
- Nurnajmiati. (2018). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Uang (Money Politic) di Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Suatu Penelitian Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Selatan) Volume 2, Nomor 1. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Purwadi, W. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Prespektif Ketatanegaraan, Volume 12, Nomor 2. *Jurnal Legalitas*.
- Raharja, I. M., & Setiabudhi, I. R. (2020). Pengaturan Politik Uang Dalam Prespektif Hukum Pidana Pemilihan Umum, Volume 9, Nomor 6. *Jurnal Kertha Wicara*.

- Saputra, D., Kurniawan, Surya, A. P., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Volume 6, Nomor 2. *Halu Oleo Law Riview*.
- Saritawala, A., Rahmadia, A., & Nelwati, S. (2024). Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila di Indonesia, Volume 2, Nomor 3. *Garuda Jurnal Pendidikan Kewenegaraan dan Filsafat*.
- Satriya, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Volume 5, Nomor 1. *Jurnal Anti Korupsi*.
- Siaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kontruksi UUD NRI 1945, Volume 7, Nomor 1. *Binamulia Hukum*.
- Subekti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Suparno, & Jatmiko, W. (2020). Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pendekatan Hukum Progresif, Volume 1, Nomor 5. *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*.
- Sutani, S. A., Lopian, M. T., & Wilar, W. (2022). Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Volume 2, Nomor 1. *Jurnal Eksekutif*.
- Syahputra, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Prespektif Victimologi ((Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area* .
- Umar, M., & MA. (2015). Money Politic dalam Pemilu Prespektif Hukum Islam, Volume 5, Nomor 1. *Ejournal Unuja*.

Widiastanto, A., Sukarna, K., Hidayat, A., & Sadono, B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019, Volume 4, Nomor 1. *Jurnal USM Law Riview*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Data Elektornik

Kompas, *Politik Uang Rawan dalam Masa Kampanye*,

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/10/14/politik-uang-rawan-di-masa-kampanye>, Akses tanggal 5 Februari 2025.

Detik com, *Banding Jaksa Dikabulkan, Lima Terdakwa Politik Uang di Vonis 3 Tahun*

Bui, <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7721701/banding-jaksa-dikabulkan-5-terdakwa-politik-uang-sleman-divonis-3-tahun-bui>, Akses terakhir tanggal 8 Februari 2025.

Detik com, *Status Kiskandar sebagai DPO-Tersangka Politik Uang di Minggir Sleman Dicabut*, terdapat dalam <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7709367/status-kiskandar-sebagai-dpo-tersangka-politik-uang-di-minggir-sleman-dicabut>. Akses tanggal 4 Februari 2025.

Antara News, *Sejarah Pemilu, Pemilu Orde Lama (1945-1965)*, terdapat dalam

<https://www.antaranews.com/berita/421358/sejarah-pemilu-pemilu-era-orde-lama-1945-1965> 27 Februari 2017. Akses tanggal 4 Februari 2025.

Dr. Septa Candra, S.H., M.H, *Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu*, terdapat

dalam <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>. Akses terakhir tanggal 5 Februari 2025.

Komidigi, *Pemilih Pemula Rentan Sasaran Politik Uang*, terdapat dalam <https://www.komidigi.go.id/berita/artikel/detail/pemilih-pemula-rentan-sasaran-politik-uang>, Akses tanggal 10 Februari 2025.

Media Indonesia, *Sederet Modus Politik Uang Pemilu 2024*, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/604482/sederet-modus-politik-uang-pemilu-2024>, Akses tanggal 10 Februari 2025.

Bawaslu.go.id, *Bawaslu Petakan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Soal Politik Uang, Lolly Ingatkan Upaya Pencegahan*, terdapat dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-petakan-kerawanan-pemilu-dan-pemilihan-soal-politik-uang-lolly-ingatkan-upaya>, Akses tanggal 10 Februari 2025.

Bawaslu.go.id, *Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pilkada; Memahami Pengertian, Jenis, Dan Dampaknya*, terdapat dalam <https://semarangkab.bawaslu.go.id/berita/fenomena-politik-uang-dalam-pemilu-dan-pilkada-memahami-pengertian-jenis-dan-dampaknya>, Akses tanggal 2 Maret 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perluasan Makna Subjek Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu, Kewenangan Pembuat Undang-Undang*, terdapat dalam <https://testing.mkri.id/berita/perluasan-makna-subjek-hukum-tindak->

[pidana-politik-uang-dalam-uu-pemilu,-kewenangan-pembuat-undang-undang--21715,](#)

Akses tanggal 2 Maret 2025.

Detik com, *Kronologi Lurah Sendangmulyo Ungkap Politik Uang di Wilayahnya*, terdapat dalam <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7657008/kronologi-lurah-sendangmulyo-ungkap-politik-uang-di-wilayahnya>, Akses tanggal 27 April 2025.

Sorot Sleman, *Dugaan Money Politic, Bawaslu Sleman Amankan Uang Tunai Rp.12,6 Juta di Kapanewon Minggir*, terdapat dalam <https://sleman.sorot.co/berita-5457-dugaan-money-politic-bawaslu-sleman-amankan-uang-tunai-rp126-juta-di-kapanewon-minggir.html>, Akses tanggal 27 April 2025.

Harian Jogja, *Dugaan Politik Uang di Sleman, Pakar Hukum Minta Bawaslu Bertindak*, terdapat dalam <https://news.harianjogja.com/read/2024/11/25/500/1196057/dugaan-politik-uang-di-sleman-pakar-hukum-minta-bawaslu-bertindak>, Akses tanggal 27 April 2025.